

Tindak Lanjut dan Monitoring:

PROSES PROSPEKTIF PARTISIPATIF ANALISIS (PPA) DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Bayu Shantiko dan Alfa Ratu Simarangkir
Kapas Hulu, 2012



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable
Institutional Arrangements for Strengthening Land
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia
(CoLUPSIA)**



RANGKUMAN MONITORING PROSES PPA

A. Konsultasi tingkat kecamatan/Desa

Skenario yang diinginkan terjadi: Langkah Serampak

Alasan:

- a. Adanya keterlibatan masyarakat (partisipatif) dari proses perencanaan sampai pengawasan
- b. Meningkatkan pola pikir masyarakat sehingga mampu merencanakan lebih baik
- c. Peluang lebih besar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai modal dalam pekerjaan
- d. Dengan kondisi kondusif (Hukum adat dan nasional yang sinkron) maka pembangunan mudah diwujudkan

Skenario yang ditakutkan terjadi: Makan tuba buah

Alasan:

- a. Mementingkan diri sendiri/kelompok atau golongan
- b. Kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan serta penguasaan teknologi
- c. Keberadaan hukum adat/hukum nasional kurang dihargai dan dipatuhi

B. Konsultasi tingkat kabupaten

Peserta sepakat bahwa skenario Langkah serampak merupakan yang diinginkan terjadi, namun peserta juga menggarisbawahi kalau penting untuk mendiskusikan bagaimana mencapainya. Beberapa tantangan ke depan yaitu:

- Pergantian tampuk pimpinan kabupaten (20 tahun, 4 kali ganti bupati)
- Perencanaan mikro dan lembaga yang memantau proses implementasi perencanaan tersebut.
- Bagaimana hasil PPA masuk ke dalam PERDA. Idealnya perencanaan harus berdasarkan pada penelitian ilmiah

C. Pandangan lain tentang skenario Kapuas Hulu:

- Skenario bisa berbeda-beda untuk masing-masing kecamatan karena Potensi yang berbeda, SDM dan SDA berbeda, Adat istiadat berbeda.
- Adanya kendala kebijakan khususnya untuk kawasan konservasi (mengapa hanya pariwisata? Mengapa tidak potensi lain misalnya ikan, madu dan lainnya)
- Keempat skenario bisa semua terjadi ke depannya, atau bisa juga gabungan antara skenario 1 sampai 4
- Sekarang skenario 2 sampai 3 sudah terjadi. Skenario 1 juga sudah terjadi hanya untuk lingkup yang lebih kecil, misalnya di level RT atau Dusun atau Desa

RENCANA TINDAK LANJUT PPA KAPUAS HULU

(hasil diskusi dalam lokakarya kemajuan CoLUPSIA 2012)

1. Program Rancang ulang peruntukan lahan

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Melakukan koordinasi dan pemantapan serta kesiapan untuk melakukan pemetaan ulang terhadap peruntukan lahan	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah, masyarakat, pengusaha dan NGO	<ul style="list-style-type: none">• Dimulai sejak sekarang
Harus mengumpulkan aspirasi dari masyarakat mulai dari wilayah kawasan sampai administratif, tepat dan akurat	<ul style="list-style-type: none">• Kolaboratif masyarakat dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Jangka pendek
Memfasilitasi/mediasi antara masyarakat dengan pihak lain	<ul style="list-style-type: none">• Pemda• Investor• Camat	<ul style="list-style-type: none">•

2. Penguatan kolaborasi antar komponen pelaku pembangunan (pemda, masyarakat, swasta)

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Dengan membuat kesepakatan bersama antara pihak terkait dan masyarakat dengan cara menggelar pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan	<ul style="list-style-type: none">• Pemda, DPRD, masyarakat dan pengusaha	<ul style="list-style-type: none">• Dimulai sejak sekarang
<ul style="list-style-type: none">• Memaksimalkan fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">• Pemda• DPR• Masyarakat• Pengusaha	<ul style="list-style-type: none">•
Memperhitungkan social cost dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">•

3. Pengakuan hak masyarakat adat di wilayah adat

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Buat tim terpadu melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none">• tim teknis yang melibatkan masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none">• satu tahun anggaran berjalan
Memperhitungkan social cost dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">•

4. Pemilihan komoditas yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
• Intensifikasi perkebunan karet dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan dan pemeliharaan yang benar	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (poktan) • Pemda (disbunhut) • Swasta 	•
• Pengembangan teknologi tepat guna (pengembangan PLTMH, pengolahan air bersih, pemanfaatan sumber air untuk perikanan dan pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pertambangan dan energi • Dinas cipta karya • Dinas perikanan • Dinas pertanian • Masyarakat • BUMD (swasta) 	•
Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan tetap berazaskan kelestarian lingkungan	• Dinas kehutanan (pemda) dan kementerian kehutanan (BTNBK, BTNDS)	• Pelaksanaannya setiap tahun
Energi ramah lingkungan (air terjun, gas dan angin)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pertambangan dan energi • Bappeda 	•

Catatan:

- a. Pemilihan komoditas ramah lingkungan: siapa yang menentukan?
- b. perkebunan rakyat harus ada karena memungkinkan masyarakat menjadi investor

5. Peningkatan SDM

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Pemerataan tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan guru di daerah terpencil	• Dinas pendidikan pusat dan daerah	• 2013
Pendirian universitas di kapuas hulu	• Dinas pendidikan, pemda, DPRD, pusat	• 2013
Diklat aparatur pemerintah	• Pemda, Mendikbud, Pusat	•
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat • Pemerintah daerah 	•
Pemerataan dana BOS	• Pusat, daerah	•
Beasiswa untuk yang berprestasi	• Pusat, daerah	•
<ul style="list-style-type: none"> - Kursus komputer - Penggunaan GPS - Pembuatan peta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • LSM 	•

Catatan:

- a. Pendirian universitas urgen karena di daerah perbatasan
- b. Kenapa tidak politeknik lebih dulu? Siapa yang bayar?

6. Regulasi yang konsisten dan tidak bertentangan antara pusat dan daerah

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Sering dilakukan FGD untuk mengetahui isu terkini mulai daerah sampai pusat agar diperoleh kebijakan yang tepat dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaboratif (masyarakat, pemerintah dan stakeholder) dengan pemerintah sebagai fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diadakan setiap tahun

7. Pengawasan proyek dan kegiatan

Tindakan	Siapa yang melakukan	Kapan akan dilakukan
Dalam pelaksanaannya instansi terkait harus melibatkan masyarakat setempat sehingga penilaian mutu penilaian lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi terkait dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kegiatan proyek

Survey respon terhadap skenario PPA

(27 september – 11 Oktober 2012)

Responden	Piet Sumarwoto
Instansi	Bidang perkebunan, Disbunhut
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan?	<ul style="list-style-type: none"> - Visi dan pelaksanaannya berbeda sehingga hasilnya tidak terlalu bagus. Antara visi bupati dan kepala dinas seringkali berbeda dan adanya kurang koordinasi antar SKPD. Kebijakan bupati kesini, sementara di dinas ke arah lain yang belum tentu sejalan dengan visi/misinya. - SDM dalam aspek moral dan mental - Kemauan politik untuk mensejahterakan masyarakat kurang sehingga program dinas hanya sebatas proyek yang seringkali tidak ada kelanjutannya
Mana skenario yang diinginkan terjadi	Skenario 1 adalah skenario ideal dimana kesejahteraan dan partisipasi masyarakat tercapai.
Mana skenario yang tidak diinginkan terjadi	Skenario 2,3,4
Mana skenario yang mungkin terjadi jika para pihak tidak melakukan tindakan	
Apa peran (kebijakan, tindakan) dinas Bapak untuk mendorong terwujudnya skenario yang diinginkan dan mengantisipasi skenario yang tidak diinginkan?	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan harus ditegakkan oleh pemerintah. Kebijakan berkaitan dengan perkebunan sebenarnya sudah ada dan aturan yang mengikuti. - Untuk sektor perkebunan, semua kebun wajib mengimplementasikan ISPO mulai 2015 - Visi pihak-pihak yang membangun sektor perkebunan harus berorientasi untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok
Siapa yang perlu terlibat untuk mendukung tindakan dan peran tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda -> tata ruang - Biro hukum -> produk hukum turunan - TNI/Polri -> produk hukum turunan - BPN -> tata batas - Masyarakat - Perusahaan -> koperasi sawit (Kopsa)
Bagaimana cara memastikan koordinasi antar para pihak?	<p>Kendala untuk koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya ego sektoral. Faktor ini penting untuk kesuksesan koordinasi - Tidak ada follow up dari atas sampai bawah untuk memastikan bagaimana kebijakan sampai dengan implementasi sesuai dengan arahan. Salah satunya diakibatkan lemahnya kepemimpinan - Belum ada satu visi untuk memajukan kapuas hulu - Tumpang tindih program antara satu instansi dengan yang lain masih mengerjakan hal sama dan kurang komunikasi.

Responden	Sudirman
Instansi	Dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan?	
Mana skenario yang diinginkan terjadi	Skenario 1
Mana skenario yang tidak diinginkan terjadi	Skenario 2,3,4
Mana skenario yang mungkin terjadi jika para pihak tidak melakukan tindakan	Skenario 4 lebih menggambarkan keadaan yang terjadi saat ini dimana kebijakan tidak ada prioritas. Kepentingan politik mengakibatkan anggaran diarahkan pada kemauan elite politik, tanpa melihat kesinambungan dengan program yang ada. Ditambah lagi anggaran yang ada juga terbatas.
Apa peran (kebijakan, tindakan) dinas Bapak untuk mendorong terwujudnya skenario yang diinginkan dan mengantisipasi skenario yang tidak diinginkan?	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program sesuai prioritas dan berkelanjutan. Program kegiatan tidak harus banyak, yang penting fokus dan direncanakan sampai dengan 5 tahun ke depan sehingga program tahunan merupakan kelanjutan program tahun berikutnya. → Memastikan renstra (5 tahun) bisa berjalan Contoh: tahun 1. Cetak sawah; tahun 2 infrastruktur; tahun 3 sarana dan prasarana dst - Perencanaan kegiatan agar dilakukan satu tahun sebelumnya, yang didahului oleh survey lapangan khususnya untuk kegiatan fisik. - Melibatkan Bappeda untuk merencanakan dan sinkronisasi antara program SKPD dan kemauan legislatif - Audiensi dengan anggota dewan untuk perencanaan alokasi dana aspirasi, contoh: dana DAU digunakan untuk pengembangan peternakan terpadu, dikombinasikan dengan dana aspirasi untuk pembelian mesin - Komunikasi dengan para pihak: Bappeda, Dewan dan Bupati - Menerapkan kebijakan tidak ada tawar menawar agar menghindari masuknya program baru diluar yang sudah dianggarkan dan direncanakan - Mendorong agar proyek yang menggunakan dana aspirasi juga didiskusikan didalam musrenbang agar perencanaan berjalan dengan baik (selama ini belum terjadi) -
Siapa yang perlu terlibat untuk mendukung tindakan dan peran tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan Bappeda untuk merencanakan dan sinkronisasi antara program SKPD dan kemauan legislatif - DPRD -> untuk memastikan persetujuan legislatif terhadap usulan program dari eksekutif - Bupati -> menyediakan kepemimpinan -
Bagaimana cara memastikan koordinasi antar para pihak?	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dengan para pihak

	-
Responden	Indra Kumara
Instansi	Disbunhut
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan?	- Pola pikir aparat pemerintah masih belum mendukung birokrasi yang efisien
Mana skenario yang diinginkan terjadi	- Skenario 1
Mana skenario yang tidak diinginkan terjadi	- Skenario 2,3,4
Mana skenario yang mungkin terjadi jika para pihak tidak melakukan tindakan	-
Apa peran (kebijakan, tindakan) dinas Bapak untuk mendorong terwujudnya skenario yang diinginkan dan mengantisipasi skenario yang tidak diinginkan?	- Mendorong komitmen para pihak - Mendorong komunikasi para pihak, seringkali terkendala pergantian personil sehingga komunikasi harus selalu dibangun terus-menerus - Melibatkan Bappeda, pertanian, NGO (FFI, WWF etc) - Terkait dengan LUP: dinas mendorong pemetaan partisipatif di beberapa desa (Pulau Manak, Sadap, Labian Iraang, Lanjak Deras). Diharapkan melalui pemetaan partisipatif, muncul kebutuhan untuk tata guna lahan bersama (belum tercapai) dan adanya tata batas bersama
Siapa yang perlu terlibat untuk mendukung tindakan dan peran tersebut?	- Bappeda untuk menyusun RPJMD dan rencana tahunan - Dinas pertanian - NGO
Bagaimana cara memastikan koordinasi antar para pihak?	- Siapa yang melakukan? Sejauh ini masih sulit karena belum ada kemauan. Adanya kemauan merupakan sebuah prasyarat - Komunikasi berkelanjutan, namun sering terkendala pergantian orang disetiap pertemuan
Responden	Syarif Usmardan
Instansi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan?	-
Mana skenario yang diinginkan terjadi	- Terkait skenario 1 sampai 4, dalam kenyataannya berjalan simultan. Skenario 1 merupakan skenario ideal
Mana skenario yang tidak diinginkan terjadi	- Skenario 3 paling parah karena terjadi chaos tanpa peran pemerintah. Namun skenario 3 dan 4 bisa digabungkan dimana terjadi keserampangan investasi sehingga masyarakat tidak mendapat hasil
Mana skenario yang mungkin terjadi jika para pihak tidak melakukan tindakan	- Selain 4 skenario tadi, saya mendefinisikan skenario lain yaitu 3 skenario: ideal, ekstrem dan proporsional. - Dalam skenario ideal variabel ekonomi dan infrastruktur berada dalam kondisi optimal didukung masyarakat yang mandiri. - Pada skenario ekstrem: variabel pembangunan tidak

	<p>bergerak karena ketidakmampuan pemerintah, tidak ada good governance, SKPD tidak peduli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada skenario proporsional adalah jalan tengah dimana situasi ideal yang tidak diimplementasikan
Apa peran (kebijakan, tindakan) dinas Bapak untuk mendorong terwujudnya skenario yang diinginkan dan mengantisipasi skenario yang tidak diinginkan?	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung kebijakan diseluruh sektor - Pemenuhan infrastruktur dasar (air, jalan, tata ruang pemukiman, air minum, kesehatan lingkungan, tata bangunan dan infrastruktur - Menyediakan aksesibilitas infrastruktur
Siapa yang perlu terlibat untuk mendukung tindakan dan peran tersebut?	-
Bagaimana cara memastikan koordinasi antar para pihak?	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi tidak berjalan karena tidak ada blueprint dan masih ada ego sektoral - Program tidak sinkron antara program pusat dan kabupaten Contoh: adanya program seperti PNPM menyebabkan kritikan terhadap program kabupaten karena ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemda sehingga output yang dihasilkan lebih sedikit dengan anggaran yang sama jika dilakukan oleh PNPM.
Responden	- Rismawati
Instansi	- Dinas Perikanan
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan?	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan daerah sudah dikeluarkan tetapi penegakan hukumnya lemah sehingga tetap terjadi konflik sumber daya alam khususnya perikanan - Konflik di sumber daya ikan diperkirakan akan tetap muncul seperti masalah penubaan ikan (secara kimia)
Mana skenario yang diinginkan terjadi	- Skenario 1 ideal
Mana skenario yang tidak diinginkan terjadi	-
Mana skenario yang mungkin terjadi jika para pihak tidak melakukan tindakan	-
Apa peran (kebijakan, tindakan) dinas Bapak untuk mendorong terwujudnya skenario yang diinginkan dan mengantisipasi skenario yang tidak diinginkan?	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pembuatan perda yang mengatur sumber daya perikanan - Sosialisasi perda agar sampai di masyarakat, selama ini baru sampai tahap elit. Dinas sudah membuat buku saku perda yang relevan dengan perikanan
Siapa yang perlu terlibat untuk mendukung tindakan dan peran tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum mestinya tanggung jawab bersama. Selama ini masyarakat belum memahami perda yang sudah dikeluarkan walaupun sudah ada sosialisasi. Masalahnya bisa di tingkat pemahaman yang belum cukup ditambah lagi penegakan hukum oleh aparat kepolisian lemah. Akibatnya masalah seperti penubaan danau lindung masih sering terjadi

	<ul style="list-style-type: none"> - Camat, dinas, sekda, bupati, kepolisian - Penguatan masyarakat hukum adat, karena ada contoh desa Empangau yang kuat hukum adatnya bisa mencegah pemanfaatan yang berlebihan - Adanya kesepakatan antar masyarakat yang mengelola SD perikanan - Melibatkan Pokmaswas: kelompok masyarakat pengawas danau lindung
Bagaimana cara memastikan koordinasi antar para pihak?	-